

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tokoh filsafat politik yang hidup pada abad 18 yang paling terkemuka salah satunya adalah Niccolo Machiavelli. Tokoh ini masyhur dengan sebutan bapak politik modern walaupun pemikirannya tidak dianggap sangat revolusioner. Namun, sebutan itu disematkan pada Machiavelli berkat pemikirannya yang dianggap berhasil mengeluarkan hegemoni belenggu politik dari cengkraman Gereja (Machiavelli, 1991). Machiavelli pada masanya, banyak mengemukakan mengenai etika politik yang dianggapnya benar kemudian dituangkan dalam karyanya. Salah satu hal yang membuat Machiavelli terkenal adalah teorinya yang dianggap amoral, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan dan mempertahankannya. Apabila kita meneliti secara lebih rinci dan objektif, kita dapat mengetahui hal yang melatar belakangi teori tersebut dicetuskan.

Pembahasan mengenai Niccolo Machiavelli difokuskan membahas kerangka pemikirannya dalam etika politik. Hal ini dikarenakan beberapa hal dan latar belakang pemikirannya, diantaranya:

1. Negara Florence, tempat tinggal Machiavelli mengalami transisi kekuasaan, yang berhasil membuat Machiavelli menjadi tokoh penasehat yang berpengaruh dan mengungkapkan berbagai gagasan hasil kajiannya (Machiavelli, 1991).
2. Terjadinya dinamika pergeseran dan peralihan kekuasaan, membuat posisi Machiavelli pun berubah-ubah. Machiavelli kadang menjadi pejabat negara

yang sangat berpengaruh, namun juga pernah dibuang dan diasingkan bahkan ditahan dan diperlakukan buruk oleh penguasa yang berhasil memenangkan peperangan dan tidak menyukai Machiavelli. Kondisi ini disebabkan oleh penguasa yang menduduki singgasana Florence. Ketika klan Medici mengalami kemunduran dan digantikan oleh klan Sodereni (Machiavelli, 1991), Machiavelli adalah salah satu orang yang berhasil duduk diposisi tertinggi, karena kedekatannya dengan Sodereni, Machiavelli berkontribusi sangat besar pada negara tersebut. Boleh dikata, Machiavelli mencapai puncak kejayaannya masa-masa ini. Namun, ketika kekuasaan digulingkan dan diambil alih lagi oleh klan Medici, Machiavelli dianggap oposisi sehingga beliau diasingkan.

3. Machiavelli terkenal dengan sebutan bapak kelicikan politik (Machiavelli, 1991). Bahkan ada yang menyebutkan pada titik ekstrim sebagai *par excellence* yang memiliki arti penipu dan pengkhianat politik. Sebutan ini disematkan atas pemikirannya yang sangat tirani dan bersifat totalitarian pada masa modern yang menginspirasi berbagai tokoh tiran, licik dan brutal di dunia.

Dalam dunia politiknya, Machiavelli menganggap bahwa etika memiliki nilai zero atau nol (Machiavelli, 1991). Artinya, tindakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa memancarkan nilai otentik dan absolut sehingga memancarkan suatu kepemimpinan yang khas. Kebijakan-kebijakan itu tidak perlu memakai pertimbangan etika. Hal ini sangat penting, menurutnya, demi menjaga stabilitas dan kelangsungan negara dari segala ancaman provokasi, kudeta dan

oposisi. Konsep pola kepemimpinan politik inilah yang kemudian banyak dicermati, dipahami dan disukai oleh para pembaca karya-karyanya.

Kekuasaan adalah hal absolut yang perlu dipertahankan dengan sangat kuat, dan etika tidak perlu dipakai dalam politik (Machiavelli, 1991). Menurut Machiavelli, Etika dianggap melemahkan sikap pembuat keputusan dan akan memperlemah negara juga pemimpinnya. Machiavelli kemudian memisahkan antara politik, kekuasaan dan etika, dalam berbagai karyanya diantaranya ; *The Discourses* dan *The Prince* karya-karyanya dianggap oleh para sejarawan sebagai inovasi yang untuk memperkuat kekuasaan. Walaupun Machiavelli berasal dari daratan Eropa, namun pemikirannya dianggap bertolak belakang dengan kebudayaan dan tradisi barat yang menjunjung tinggi etika dalam pengambilan keputusan dan kedekatan dengan gereja yang mempengaruhi segala kebijakan (Machiavelli, 1991). Seperti contoh Aristoteles, yang memiliki pandangan bahwa politik sebagai perluasan dari etika. Pada saat itu, dalam pandangan barat, etika dipakai sebagai alat ukur dalam membedakan kerangka politik yang salah dan benar, adil dan tidak adil. Moral dan etika menjadi alat ukur yang digunakan sebagai evaluasi tindakan dan tingkah laku manusia dalam dunia politik. Saat itu, Machiavelli sudah menggunakan istilah *la stato* dalam karyanya ketika menggambarkan sebuah kekuasaan, *la stato* berasal dari istilah latin status, yang memiliki arti kekuasaan yang memaksa, Machiavelli tidak menggunakan istilah *dominium* berarti kekuasaan yang lebih sempit dan pribadi.

Semasa hidupnya, Machiavelli menyaksikan dinamika politik yang terjadi di negaranya. Florence, pada masa tersebut mengalami gejolak politik dan terjadi

perebutan kekuasaan (Benedanto, 2015). Hal ini mengakibatkan Florence menjadi negara yang tidak stabil, lemah, ekonomi sulit dan rakyat menderita. Florence mengalami krisis multidimensional dan mudah diserang oleh negara-negara lain yang ingin mengkukuhnya. Keadaan ini membuat Machiavelli prihatin dan miris. Oleh Karena itu, Machiavelli mengungkapkan gagasannya kepada penguasa di Negerinya yang kala itu dipegang oleh keluarga Medici, agar Florence bangkit dari keterpurukan dan tidak hancur, terlepas dari dirinya yang kembali berkibrah dalam dunia politik maupun tidak.

Gagasan kekuasaan yang diungkapkan Machiavelli pada dasarnya merupakan hasil dari refleksi politik semasa hidupnya (Benedanto, 2015). Berbagai fenomena politik yang terjadi disekitarnya membuat Machiavelli berfikir apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki situasi yang dialami negaranya. Terjadinya macam - macam provokasi dan penggulingan kekuasaan yang terjadi di Eropa umumnya membuat Machiavelli sadar bahwa manusia pada dasarnya selalu haus akan keserakahan. Sehingga Machiavelli berfikir, bahwa penguasa harus dapat menaklukkan semua tabiat buruk rakyatnya dan mahir dalam kepemimpinan. Dia berfikir, penguasa harus sangat absolut, dominan dan otoriter, sehingga rakyat dapat mengekang nafsu keserakahannya terhadap kekuasaan.

Machiavelli merupakan seorang penganut paham realism. Artinya, dia adalah seseorang yang berfikir bahwa kepentingan negara itu absolut dan berada pada puncak segalanya. Dia berfikir seorang penguasa harus mendahulukan dan memperjuangkan kepentingan negara dengan cara yang optimal walaupun menggunakan cara yang tidak lazim, licik dan memaksa (Muchtart, 2018).

Sehingga, kepentingan negara ditetapkan sebagai prioritas tertinggi bagi pemerintahan dalam membuat kebijakan bagi rakyat. Dengan demikian, Machiavelli menganggap teologis, moral, etika dan agama tidak bertentangan dengan negara. Walaupun, praktek-praktek moral harus dipisahkan dari pengambilan keputusan.

Dalam, gagasannya, Machiavelli memiliki pendapat yang berbeda dengan pemikir politik lainnya. Menurutnya, politik bukanlah suatu kekuatan untuk mengabdikan kepada agama, budaya dan moral. Hal – hal seperti etika tak bisa membatasi kekuasaan politik. Baginya, kekuasaan adalah alat yang dipakai untuk mengabdikan dan memperjuangkan negara untuk sampai pada puncaknya, bukan sebagai sarana melakukan kebaikan keadilan, kebajikan dan ketuhanan. Hal yang paling penting dan perlu diperjuangkan sebagai nomor satu adalah negara. Menurutnya, penguasa harus mampu bertindak mana yang dianggap baik oleh negara dan mana yang tidak perlu dilakukan untuk negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin negara harus mampu menghantarkan bangsanya dalam kehidupan yang lebih baik, kuat dan kokoh (Puspitasari, 2001). Untuk mencapai hal ini, negara harus melakukan apapun yang dianggap perlu dan mengabaikan etika.

Dalam bukunya pun, Machiavelli merujuk pada adanya aspek - aspek kepemimpinan, yakni yang berdasarkan pada kecakapan diri sendiri (virtue) dan yang disebabkan oleh Nasib baik (fortune) (Benedanto, 2015). Ia menjelaskan, para pemimpin yang dianugerahi virtue (kecakapan) ini adalah mereka memiliki “kecerdikan” dan “daya pikir hebat”. Sedangkan, fortune adalah nasib baik, keberuntungan yang didapat seorang. Seseorang yang berhasil dalam memimpin,

menurut Machiavelli, karena pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat yang hebat, walaupun aspek keberuntungan memang memiliki kontribusi tetapi tidak sebesar "keinginan"

Kemudian, menilik sejarah pemegang kekuasaan di Indonesia, rezim orde baru adalah rezim yang paling lama berkuasa. Dari tahun 1966 hingga 1998 Indonesia dipimpin oleh Soeharto, yang merupakan presiden di Indonesia yang memiliki masa jabatan paling lama, yaitu 32 tahun.

Orde Baru merupakan masa yang dikenal dengan dominasi negara dan kekuasaan otoriter pemimpinnya (Farchan, 2022). Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan, melakukan sentralisasi sumber daya dan kendali penuh untuk membentuk stabilitas politik yang menjadi dasar untuk memperlancar agenda-agenda pembangunan. Pembicaraan mengenai corak kepemimpinan dan pembawaan Soeharto, menarik menjadi diskursus ketika dihubungkan dengan pemikiran yang memiliki corak serupa pada zaman Renaissance, Niccolo Machiavelli.

Keseluruhan konsep yang telah penulis ungkapkan secara garis besar mengenai Machiavelli ini situasinya cukup mirip dengan masa peralihan dari orde lama ke orde baru. Kondisi sosial negara Indonesia yang carut marut, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah akibat terjadinya pelanggaran HAM, kejadian G30S PKI, dan masalah-masalah Negara lain, membutuhkan sosok yang otoriter yang mampu menanggulangi semua masalah tersebut. Kemudian lahirlah Orde Baru yang menjadi nama rezim pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden

Soeharto selama 32 tahun yang memiliki sifat dan karakter sesuai dengan pemikiran Machiavelli (Farchan, 2022).

Relevansi pemikiran Niccolo machiavelli yang memiliki corak khas dan kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk membahasnya dalam suatu pembahasan ilmiah, mengenai era kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggunakan absolutisme politik, kebijakan-kebijakan otoriter dan totaliter yang dikeluarkannya pada masa orde baru.

Maka penulis, pada penelitian ini berupaya meninjau secara mendalam mengenai konsep relevansi dari pemikiran Machiavelli tentang model negara serta kekuasaan dengan pemerintahan masa Presiden Soeharto, dengan menggunakan metode sosio-historis, yang dijelaskan secara studi pustaka mengenai Indonesia yang mengalami situasi mirip dengan Italia ketika pemikiran Machiavelli berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana relevansi pemikiran politik Machiavelli dengan kekuasaan dalam gaya kepemimpinan Soeharto ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada penelitian ini, penulis fokus membahas relevansi konsep negara dan kekuasaan di Indonesia dalam gaya kepemimpinan Soeharto dengan pemikiran tokoh Barat yakni Niccolo Machiavelli.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Niccolo Machiavelli dan memaparkan kesesuaiannya pada konsep negara dan kekuasaan masa Soeharto.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti ini, maka diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini yakni akan memberikan dampak yang baik bagi para pembaca serta menambah wawasan tentang konsep negara dan kekuasaan yang otoriter yang pernah yang diterapkan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, memberikan kesempatan bagi para pembaca untuk memahami konsep negara kekuasaan politik yang sentralistik dan otoriter di Indonesia . Selain itu juga dapat menjadi jembatan kecil bagi mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu terkini dengan menggunakan teori Niccolo Machiavelli, khususnya yang berhubungan dengan negara dan kekuasaan di negara Indonesia.